



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa), Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 74);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BULU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DESA BULU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	762.203.000,-
2. Belanja Desa		
I. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai/Honorarium /Bengkok	Rp.	180.000.000,-
b. Belanja Bahan Paki Habis	Rp.	2.000.000,-
c. Belanja ATK	Rp.	903.000,-
d. Belanja materai	Rp.	60.000,-
e. Belanja Material Perawatan Kantor	Rp.	5.000.000,-
f. Belanja Pemasangan Jaringan Pamsimas	Rp.	275.000.000,-
g. Belanja Inventaris Pemeliharaan Kantor	Rp.	1.000.000,-
h. Belanja Rekening Listrik Milik Desa	Rp.	150.000,-
i. Belanja Seragam Dinas Perangkat Desa	Rp.	1.000.000,-
j. Belanja Papan Proyek>Nama	Rp.	100.000,-
k. Belanja Foto Copy Pedum	Rp.	40.000,-
k. Belanja Pembangunan Sarpras Desa	Rp.	147.016.000,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<u>613.669.000,-</u>

II. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Tunjangan Kerja Perangkat Desa	Rp.	4.000.000,-
b. Belanja Operasional BPD	Rp.	5.234.000,-
c. Belanja Tambahan Penghasilan Kepala desa & Perangkat Desa	Rp.	66.000.000,-
d. Belanja Kesejahteraan Ketua RT	Rp.	1.800.000,-
e. Belanja Kegiatan HUT RI	Rp.	23.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	<u>100.034.000,-</u>

III. Belanja Hibah

a. Belanja Pembangunan Drainase	Rp.	40.000.000,-
Jumlah Belanja Hibah	Rp.	<u>40.000.000,-</u>

IV. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja Keg.10 Program Pokok PKK	Rp.	5.000.000,-
a. Belanja BBGR LPMD	Rp.	1.750.000,-
a. Belanja Keg. Karang Taruna	Rp.	1.750.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	<u>8.500.000,-</u>

Jumlah Total Belanja	Rp.	<u>762.203.000,-</u>
Selisih Lebih / Kurang	Rp.	0,-
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pada tanggal 30 Desember 2014
KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

RUJIAH

Diundangkan di : Bulu
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DESA
BULU,

Ttd/Cap

INDUN



PERATURAN DESA BULU

NO: 03 TAHUN 2014

TENTANG

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
(APBDes)
TAHUN 2014**

**PEMERINTAH DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**